

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN PENATAAN PARIWISATA MENUJU WISATA DUNIA DI BAPPEDA KABUPATEN PANGANDARAN

Angga Pramuditiya¹, Andre Ariesmansyah²

¹ Program Studi Administrasi Publik Universitas Pasundan

² Program Studi Administrasi Publik Universitas Pasundan
andre.ariesmansyah@unpas.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui *Collaborative Governance* Dalam Perencanaan Penataan Pariwisata menuju wisata Dunia di Bappeda Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana jenis data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi langsung dilapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari data yang telah dikumpulkan peneliti melalui dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*), dan penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *Collaborative Governance* dalam Perencanaan Penataan Pariwisata menuju wisata Dunia di Bappeda Kabupaten Pangandaran sudah berjalan sejak Pangandaran mulai memisahkan diri dari Ciamis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa proses *Collabrative Governance* dalam perencanaan Penataan Pariwisata di Kabupaten Pangandaran sudah tertata dan juga mengajak masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran. Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Penataan Pariwisata, Perencanaan Pariwisata

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86); Salah satu bentuk dalam konsep penyelenggaraan pemerintahan atau *governance* yang disebut *collaborative governance* atau penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif. *Collaborative Governance* dapat diartikan sebagai salah satu dari bentuk *governance*. Konsep ini mengartikan akan pentingnya suatu kondisi dimana aktor publik dan aktor privat (bisnis) bekerja sama melalui cara dan proses tertentu yang nantinya akan menghasilkan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang tepat untuk publik atau masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, aktor publik yaitu pemerintah dan aktor privat yaitu organisasi bisnis atau perusahaan bukanlah sesuatu yang dapat terpisah dan bekerja secara sendiri-sendiri melainkan harus bekerja bersama demi kepentingan masyarakat. Kolaborasi dipahami sebagai kerjasama antar aktor, organisasi atau institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independent. Dalam bahasa Indonesia, istilah kerjasama dan kolaborasi biasa digunakan secara bergantian dan belum ada upaya untuk menunjukkan perbedaan dan kedalaman makna dari istilah tersebut Ansell dan Gash (dalam Zaenuri 2016) Perkembangan tata kelola pada pemerintahan, *collaborative governance* (tata kelola pemerintahan kolaborasi) menjadi fenomena dan (trend) baru yang menarik. *Collaborative Governance*

merupakan salah satu cara untuk merespon keinginan para pemegang kepentingan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan merespon keterbatasan pendanaan pemerintah yang tidak bisa mengikuti perkembangan tuntutan masyarakat akan kinerja pemerintah yang semakin baik, tujuannya untuk mendapatkan sumber daya guna dalam pelaksanaan pembangunan sesuai harapan para pemegang kepentingan tersebut. Sumber daya tersebut berada dan dimiliki oleh para pemegang kepentingan. Hal ini sesuai prinsip-prinsip dasar dalam penataan yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya buatan secara budaya guna dan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi kesetimbangan kepentingan Kesejahteraan dan Keamanan.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah, disingkat Bappeda, merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah yang juga bertindak sebagai unit kerja perangkat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat Bidang Perencanaan.

Tika Mutiarawati, Sudarmo (2015) *Collaborative* merupakan respon terhadap perubahan-perubahan atau pergeseran- pergeseran lingkungan kebijakan. Pergeseran-pergeseran ini bisa terjadi dalam bentuk jumlah aktor kebijakan yang meningkat, isu-isu semakin meluas atau sulit terdeteksi,

kapasitas pemerintah terbatas sedangkan institusi-institusi di luar pemerintah meningkat serta pemikiran masyarakat yang semakin kritis. Ketika pergeseran tersebut terjadi, maka pemerintah harus mengikuti segera, menyelesaikan dan atau mengatasi apa yang tengah menjadi isu di dalamnya. Namun demikian pemerintah tetap harus menyesuaikan dan membuat dirinya tetap relevan dengan lingkungan sekitarnya.

Alamsyah (2022) Pengembangan potensi pariwisata khususnya wisata pantai, merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa diabaikan, menyusul penetapan kabupaten Pangandaran sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan destinasi wisata kelas dunia. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mewujudkan harapan tersebut adalah menguatkan potensi desa wisata yang menekankan pada partisipasi masyarakat lokal. Pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan suatu proses penataan kota Pangandaran yang memiliki keterkaitan satu sama lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan penataan wisata pada potensi pantai barat dan timur Pangandaran. Dan berguna bagi wisatawan yang berkunjung ke pantai Pangandaran. Ariesmansyah (2022) *Collaborative* menggambarkan suatu hubungan kerja sama yang dilakukan pihak tertentu, berdasarkan kamus Heritage Amerika (2000), *Collaborative* mampu bekerja bersama khususnya dalam usaha penggabungan dalam usaha penggabungan pemikiran Gray (1989) menggambarkan bahwa kolaborasi sebagai suatu proses berpikir beberapa pihak yang terlibat memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah serta menemukan solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan pandangan mereka terhadap apa yang dapat dilakukan.

Organisasi masyarakat dan aparatur

desa memiliki suatu hubungan timbal balik yang akan saling menguntungkan dalam proses pengembangan penataan pantai suatu potensi pariwisata di pantai Pangandaran menuju wisata dunia. Hal ini sesuai prinsip-prinsip dasar dalam penataan yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan sumber Daya Buatan secara budaya guna dan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Banyak tantangan yang muncul ketika peneliti melakukan penelitian di Dinas Bappeda Kabupaten Pangandaran diantaranya, pertama kondisi awal Kabupaten Pangandaran khususnya di sektor pantai yang kurang tertata rapi, contohnya banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) berada persis di pinggir pantai Pangandaran, sehingga mengganggu pemandangan dan adanya masyarakat atau wisatawan yang membuang sampah sembarangan. Hal ini menyebabkan pantai Pangandaran kumuh, dan hotel-hotel pun masih banyak buang limbah mereka ke pantai. Tahun 2018 pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Pangandaran berhasil membuat pesisir pantai barat dan timur Pangandaran bebas dari pedagang kaki lima. Sehingga dalam penataan kota Pangandaran yang akan menjadi sektor wisata di Jawa barat tentunya akan menarik wisatawan dengan tertatanya pantai Pangandaran.

Pembangunan trotoar atau jalur pedestrian yang di perlebar dan pembangunan taman hingga ornamen ikonis. Penataan ruang pada dasarnya merupakan sebuah pendekatan dalam mengembangkan wilayah yang

bertujuan untuk mendukung beberapa prinsip, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup. Penataan ruang tidak hanya memberikan arahan lokasi investasi, tetapi juga memberikan jaminan terpeliharanya ruang yang berkualitas dan memperoleh obyek-obyek wisata aset bangsa. Kedua, dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata pantai Pangandaran, pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat. Dasar dari kolaborasi antara kedua belah pihak mengakui bahwa pengelolaan pariwisata pantai Pangandaran terjadinya kolaborasi karena adanya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam merawat dan mengembangkan objek wisata tersebut. Namun kolaborasi yang dilakukan ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena masyarakat tidak terlalu aktif dan masih kurangnya informasi serta upaya pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sehingga kolaborasi tidak berjalan dengan efektif.

Contohnya kurang memiliki Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam hal manajemen pengelolaan tempat pariwisata. Selain itu, dana yang dikeluarkan oleh kebijakan daerah setempat maupun pemerintah pusat masih minim. Ketiga, dalam hal kepemimpinan pemerintah daerah sebagai pengelola belum maksimal dan menunjukkan keterbatasan dalam kapasitasnya mengelola pariwisata. Contohnya keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah menjadi persoalan yang mendasar untuk mengembangkan sektor pariwisata pantai Pangandaran. Karena untuk mengembangkan pantai Pangandaran dibutuhkan sumber daya yang memadai sebagai seorang pemimpin. Dan keempat, dalam proses kolaboratif yang dilakukan pemerintah dengan pihak masyarakat atau pun swasta tidak berjalan secara efektif.

Karena gagalnya proses interaksi antara berbagai faktor dalam pemerintahan dengan kelompok sasaran atau individu masyarakat. Selain itu juga adanya kurang kepercayaan terhadap pemerintah sehingga sektor-sektor yang berkolaborasi masih terhambat.

Fokus penelitian ini dilakukan di Bappeda kabupaten Pangandaran, sebagai responden atau informan dalam penelitian ini adalah kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA). Penelitian ini akan di fokuskan pada “*Collaborative Governance* dalam Perencanaan Penataan Pariwisata menuju wisata dunia di Bappeda Kabupaten Pangandaran” yang objek utamanya merupakan Pariwisata pantai yang ada di Pangandaran.

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Bagaimana *Collaborative Governance* dalam Perencanaan Penataan Pariwisata menuju Wisata Dunia di Bappeda Kabupaten Pangandaran?
- (2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan yang ditemukan Bappeda Kabupaten Pangandaran dalam melakukan *Collaborative Governance* dalam Perencanaan Penataan Pariwisata menuju Wisata Dunia?

Berdasarkan penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan masalah yang di bahas. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui *collaborative governance* dalam Perencanaan

Penataan Pariwisata menuju wisata dunia di Bappeda Kabupaten Pangandaran

2. Ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan yang ditemukan Bappeda Kabupaten Pangandaran dalam Perencanaan Penataan Pariwisata menuju wisata dunia

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan deskripsi dari orang-orang atau perilaku dalam bentuk kata-kata baik lisan maupun tulisan. Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah bersifat deskriptif di mana data di rangkumkan melalui keterangan dan bukan angka. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung terkait strategi *collaborative governance* di Bappeda Kabupaten Pangandaran. *Stakeholder* atau pihak yang terlibat dalam strategi *collaborative governance* dalam penataan Pariwisata melalui Badan Bappeda Kabupaten Pangandaran. Sumber data dan informasi dapat dilakukan melalui dengan cara wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015: 2) menyatakan “Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditunjukkan memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci”..

Teknik pengumpulan data merupakan

langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data yang ada di lapangan secara akurat sesuai dengan fakta di lapangan., guna untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Adapun teknik data yang digunakan yaitu : Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan menggunakan instrumen wawancara, dokumentasi dan observasi.

Pada data penelitian kualitatif, peneliti menggunakan model analisis data yang dikemukakan oleh Miles and Huberman. Peneliti menggunakan model Miles and Huberman.

Reduksi data, dalam proses penelitian tentu peneliti mendapatkan banyaknya data, data tersebut tentu beragam. Maka dari itu peneliti perlu melakukan analisis dengan membagi hal-hal pokok, dan difokuskan pada hal-hal penting terutama yang berkaitan dengan judul penelitian.

Penyajian data, setelah peneliti melakukan reduksi data, selanjutnya peneliti melakukan penyajian data dengan teks yang sangat jelas dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber tersebut.

I. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian mengenai proses *Collaborative Governance*

Dalam

Perencanaan Penataan Pariwisata Menuju Wisata Dunia di Bappeda Kabupaten Pangandaran, guna mengetahui proses kolaborasi yang telah dilakukan, maka penelitian menggunakan indikator yang diungkapkan oleh Ansell dan Gash (dalam Fawwaz ,2017) dengan empat indikator di dalamnya sebagai berikut :

1. Kondisi Awal

Fenomena awal yang terjadi dalam relasi antar stakeholder, masing-masing aktor memiliki latar belakang yang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan demi kepentingan visi bersama. Keterlibatan stakeholder dalam setiap proses kebijakan menunjukkan hubungan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan masyarakat. Langkah ini dinilai efektif ditandai dengan banyaknya kegiatan koordinatif antar lembaga sehingga mampu mengidentifikasi kolaborasi yang akan terjadi yang kemudian menjadi tahap awal dan memberikan perencanaan

pembangunan lanjutan yang tepat dengan tekad adanya kepentingan visi bersama.

Kepentingan Visi bersama dalam memajukan Kabupaten Pangandaran Sebelum terjadinya *collaborative governance* antara Bappeda dengan badan-badan lainnya, Kabupaten Pangandaran Khususnya di sektor Pariwisata pantai belum tertata dengan rapi. Sebagai contohnya banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) berada percis di pinggir pantai Pangandaran, sehingga mengganggu pemandangan dan adanya masyarakat atau wisatawan yang membuang sampah sembarangan. Hal ini menyebabkan pantai Pangandaran kumuh, dan hotel-hotel pun masih banyak buang limbah mereka ke pantai. Pemerintah Daerah menggandeng badan-badan yang terkait agar dapat membuat pantai Pangandaran menjadi lebih tertata, kemudian pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Pangandaran berhasil membuat pesisir pantai barat dan timur Pangandaran bebas dari pedagang kaki lima. Sehingga dalam penataan kota Pangandaran yang akan menjadi sektor wisata di Jawa barat

tentunya akan menarik wisatawan dengan tertatanya pantai Pangandaran.

2. Desain Kelembagaan

Kepentingan kelembagaan yang cenderung kurang ikut berpartisipasi dalam kolaborasi di antaranya adalah masyarakat, akademisi dan media. Partisipasi mereka hadir apabila pihak swasta atau pemerintah mengundang peran dari pemangku kepentingan tersebut. Masyarakat dirasa kurang berpartisipasi dalam kolaborasi karena keterbatasan sumber daya dan kurangnya kesadaran dalam berkolaborasi. Masyarakat masih cenderung pasif untuk ikut berkolaborasi mengembangkan wisata di daerahnya. Untuk dapat berpartisipasi aktif, masyarakat masih menunggu peran dari pemerintah atau swasta sebagai pemandu mereka. Sedangkan media dan akademisi dirasakan kurang berpartisipasi karena mereka tidak memiliki sumber daya dan hak yang kuat untuk ikut dalam kolaborasi; selain itu insentif yang mereka dapatkan juga tidak sebanyak dengan yang didapat oleh pemangku kepentingan kolaborasi yang lain.

Peraturan dasar dalam kolaborasi dibuat pada hukum pada Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran terhadap program perencanaan pembangunan untuk meningkatkan sektor pariwisata menuju pariwisata berkelas dunia. Landasan utama dari setiap organisasi adalah

kepuasan masing-masing individu. Setiap orang yang akan berkolaborasi menginginkan posisi yang kuat dan adanya kesamaan. Mereka menginginkan kepuasan pribadi yang tinggi dan atau lingkungan kerja yang

mendukung dan mendorong kepuasan terhadap dirinya. Dan juga Semua orang menginginkan adanya kepercayaan dan keterbukaan dalam bekerja. Pada prinsipnya mereka juga ingin dipercaya. Akan tetapi kepercayaan tidak datang dengan mudahnya. Pada kenyataannya, banyak di antara mereka antara satu dengan yang lainnya kurang saling mempercayai.

3. Kepemimpinan

Keterkaitan kepemimpinan fasilitatif merupakan tahapan yang penting untuk melibatkan pemangku kepentingan di dalam suatu kesatuan, mendekatkan satu sama lain, dan menyatukannya di dalam satu semangat. Selain itu, kepemimpinan juga penting untuk menjaga aturan main yang ada di dalam kerjasama, membangun kerja sama antara satu dengan yang lain, memfasilitasi dialog, dan mengeksplorasi keuntungan bersama. Pada penelitian kolaborasi dalam perencanaan penataan pariwisata Kabupaten Pangandaran, peran pemimpin atau kepemimpinan fasilitatif masih sangat kurang. Kepemimpinan fasilitatif terdapat pada peran pemerintah yang dapat menjadi mediator komunikasi antara satu pemangku kepentingan dengan pemangku kepentingan lain. Akan tetapi pada pemerintah sendiri masih kurang koordinasi, baik antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, maupun pemerintah Kabupaten. Pemerintah masih memakai cara lama dalam menjalankan kewajibannya, yaitu menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya, tidak peduli apakah pemangku kepentingan lain dapat melakukan apa dan apakah hasil dari tugasnya dapat berjalan efektif.

Penetapan aturan-aturan dilakukan terjadi sebuah penandatanganan perjanjian kerjasama oleh para Stakeholders menunjukkan pemahaman yang dapat disepakati bersama untuk melakukan

sinergitas dalam pengembangan destinasi untuk mengelola destinasi wisata pantai tersebut. Masing masing pihak berusaha menjalankan program sesuai dengan tupoksinya yang telah dibuat. Pemerintah yang membangun sarana dan prasarana sesuai kapasitas yang dimiliki serta promosi yang telah menghasilkan wisata pantai Pangandaran dapat mengikuti beberapa event promosi. Akses jalan yang sudah dibangun, diadakanya pelatihan serta pendampingan terhadap sumber daya manusia pada pengelola destinasi wisata pantai Pangandaran yang memberikan pelayanan secara maksimal kepada para pengunjung memberikan kepuasan serta kepercayaan tersendiri bagi wisatawan.

4. Proses Kolaboratif

Proses dialog tatap muka antara pemerintah dan stakeholders dalam kolaborasi perencanaan penataan Pariwisata Kabupaten Pangandaran masih dalam tahap perencanaan yang bersifat koordinasi karena yang menyusun rencana penataan Pariwisata adalah pihak swasta sebagai badan pengelola dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sementara dalam pelaksanaan bersifat kolaborasi karena melibatkan masyarakat, media dan akademisi. Kepercayaan yang dibangun di antara para pemangku kepentingan dilandaskan oleh peran dan tugas masing-masing. Para pemangku kepentingan kolaborasi saling memberikan kepercayaan karena mereka yakin bahwa pada bidang tertentu pemangku kepentingan tersebut dapat melakukan perannya dengan baik.

Pemahaman bersama dalam perumusan masalah merupakan proses

awal terbentuknya rasa saling percaya tidak terlepas dari visi dan misi yang sama dalam hal ini untuk keberlanjutan pariwisata di kawasan tersebut. Selain itu, kepercayaan juga terbentuk dari komunikasi yang dilakukan secara informal yang berkelanjutan antara seluruh pemangku kepentingan sehingga diharapkan berdampak pada keterbukaan dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus masing-masing pemangku kepentingan dalam memberikan perspektifnya sehingga tujuan yang dicanangkan di awal dapat dicapai.

Pangandaran yang merupakan kabupaten paling baru yang ada di Jawa Barat dengan adanya niat dan keyakinan perubahan, Pangandaran mampu bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Jawa Barat. Hal ini mencerminkan bahwa dengan adanya kolaborasi pemerintahan merupakan suatu solusi yang tepat untuk membawa Pangandaran menjadi tempat wisata yang berkelas dunia. Dinas Bappeda Kabupaten Pangandaran telah membangun suatu kelembagaan yang tepat, dengan demikian maka suatu rencana atau tujuan yang akan dicapai dapat berjalan sesuai arahan yang diinginkan. Bappeda Kabupaten Pangandaran juga telah membuat suatu RPMJD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk per 20 tahunan. Dan prinsip kerja sama Bappeda Pangandaran dengan Pemda Pangandaran biasanya akan adanya suatu MOU kesepakatan antara kedua belah pihak. Kaitan sektor pariwisata dengan *stakeholders* pada intinya akan saling menguntungkan. dengan adanya seorang pemimpin yang bijak dalam merencanakan suatu kebijakan, maka akan mudahnya Bappeda Kabupaten Pangandaran dalam menjalankan arahan Bupati dalam proses perencanaan penataan pariwisata menuju

wisata dunia. Sehingga membuat Kabupaten Pangandaran terus maju dan mampu bersaing dengan kabupaten yang lainnya bahkan dapat bersaing dengan mancanegara.

Proses *Collaborative Governance* dalam perencanaan penataan pariwisata menuju wisata dunia di Bappeda Pangandaran, proses ini merupakan variabel yang penting, di mana proses kolaboratif diawali dengan dialog tatap muka antara Bappeda dengan para *stakeholders* terkait lainnya sudah dilakukan beberapa kali pertemuan mengenai *collaborative governance* dan mencari solusi masalah yang dihadapi, melakukan evaluasi serta kendala/hambatan dalam proses kolaborasi.

Berjalannya *collaborative governance* tentu terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat jalannya kolaborasi. Faktor penghambat bisa saja muncul dari aktor yang terlibat, atau seperangkat aturan yang telah disepakati, dan juga karena unsur politis yang mempengaruhi terhambatnya jalannya program dalam *collaborative governance*. Salah satu fungsi dari lembaga teknis daerah yang merupakan unsur perencanaan pembangunan pemerintahan daerah. Masih adanya beberapa kendala/hambatan yang ditemui pada penataan pariwisata di Dinas Bappeda Kabupaten Pangandaran. Dalam melakukan perencanaan penataan pariwisata Pangandaran pastinya ada hambatan atau kendala yang terjadi, karena itu Pemda Kabupaten Pangandaran harus bisa menangani hambatan tersebut.

Permasalahan yang sangat krusial pada destinasi pariwisata Pangandaran adalah sebagai berikut:

- a) Seperti ketidaksiapan masyarakat, ketidakpahaman tentang pariwisata dan berbagai kendala lainnya. Dengan kata lain kemampuan Sumber Daya yang masih sangat kurang dalam pengelolaan Pariwisata Kabupaten Pangandaran pada saat itu.
- b) Kepemimpinan kolaborasi kurang mampunya menjalankan perannya dengan baik, karena ketidaktahuan akan skills yang harus mereka kuasai, atau bahkan mereka tidak mengetahui bahwa kepemimpinan yang dibutuhkan dalam kolaborasi berbeda dengan kepemimpinan pada organisasi secara umum.
- c) Kurangnya sosialisasi interaksi antara pemerintah daerah terhadap masyarakat sehingga masyarakat menilai bahwa pengembangan kawasan Pariwisata kabupaten Pangandaran masih belum terlihat karena masyarakat belum terlibat sepenuhnya.
- d) komunikasi yang dibangun belum optimal, masih ada anggota kolaboratif yang belum sepenuhnya mampu mengutarakan aspirasi, gagasan dan lain- lain secara terbuka. Setiap tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga kolaboratif tersebut, sebelumnya direncanakan secara bersama melalui tatap muka langsung. Meskipun demikian belum menunjukkan hasil yang optimal dikarenakan yang hadir hanyalah delegasi-delegasinya saja sebagai perwakilan dan banyak yang tidak hadir dalam proses kolaborasi tersebut. Dan Secara umum pemangku kepentingan memiliki komitmen untuk mewujudkan keberhasilan membangun

Pangandaran maju. Namun belum semuanya memiliki keinginan yang sama, sehingga optimalisasi dan sinergi pemangku kepentingan harus terus dibangun.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta uraian pembahasan tentang kualitas pelayanan publik dalam proses *collaborative governance* dalam Perencanaan Penataan Pariwisata menuju Wisata Dunia di Bappeda Kabupaten Pangandaran, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. *Collaborative Governance* dalam Perencanaan Penataan Pariwisata menuju Wisata Dunia di Bappeda Kabupaten Pangandaran, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwasanya sejak adanya Bupati definitif baru yang mempunyai RPMJD menjadi salah satu awal perubahan kondisi pariwisata di Pangandaran. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang mumpuni dalam membantu proses pengembangan Pariwisata di Pangandaran. Secara Kelembagaan di Bappeda ada 4 Bidang , dan 5 sama sekretariat. Setiap Bidang memiliki mitra kerja dengan Dinas Pariwisata & Kebudayaan, Disparbud, DPMPTSP, Disdagopin, Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan. Dibuatnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah per 20 tahunan. Membentuk kolaborasi bukan untuk jangka pendek tetapi bagaimana caranya untuk mencapai tujuan RPMJD yang ada di Kabupaten Pangandaran. Kemudian munculnya peraturan kebijakan dari Bupati sendiri menjadi solusi dalam mempercepat

proses *Collaborative Governance*, yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016. Proses kolaborasinya melalui dialog tatap muka dengan para *stakeholders* mengenai proses *collaborative governance* dan masalah yang dihadapi akan dievaluasi lagi.

2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Bappeda Kabupaten Pangandaran yaitu seperti ketidaksiapan masyarakat, ketidakpahaman tentang pariwisata, kepemimpinan kolaborasi kurang mampunya menjalankan perannya dengan baik, Kurangnya sosialisasi interaksi antara pemerintah daerah terhadap masyarakat, dan komunikasi yang dibangun belum optimal, masih ada anggota kolaboratif yang belum sepenuhnya mampu mengutarakan aspirasi, gagasan dan lain-lain secara terbuka. Dan Secara umum pemangku kepentingan memiliki komitmen untuk mewujudkan keberhasilan membangun Pangandaran maju. Namun belum semuanya memiliki keinginan yang sama, sehingga optimalisasi dan sinergi pemangku kepentingan harus terus dibangun.

Daftar Pustaka

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

Satibi, Alamsyah, Muliawaty (2022) Penguatan Potensi Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Legokjawa Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, *Jurnal Abdimas Serawai* 2(1) , 31-39

Bustomi, Ariesmansyah, Kusdiman (2022) Partisipasi Publik Dalam *Collaborative Governance* Pada Program Sister City Bandung Dan Jepang Dalam Menanggulangi Sampah Di Kota Bandung, *Jurnal*

Ilmu Administrasi, 13(1), 48-64

Mutiawati, Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan , *Jurnal Wacana Publik* 2021, hal. 89-98

Dimas luqito Chosuma Arrozaq (2016) “*Collaborative Governance* studi tentang Kolaborasi *stakeholders* dalam pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo”

Silayar, Sartika, & Mulyati, 2021, Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Sula, *website jurnal* hal. 859-874

Sugiyono (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Diani & Simbolon (2017). Analisis Penerapan Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Bencana Lava Tour. *Forum Ilmu Sosial*, 44(1), 43–54.

<https://doi.org/10.15294/fis.v44i1.9858>

Irawan (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). IR-Perpustakaan Universitas Airlangga, 5, 1–12.

Dwiyanto, Agus, 2010. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, inklusif dan Kolaboratif. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Sudarmo. 2009, Elemen-Elemen

Collaboration Leadership dan Hambatan-Hambatan Bagi Pencapaian Efektifitas Collaboration Governance, Jurnal Spirit Publik. Vol.15, no.2, hlm: 117-132,ISSN 1907-0489

Diakses pada tanggal 7 Juli 2022 :
<https://bappeda.pangandarankab.go.id/public/> Diakses pada tanggal 7 Juli 2022 :
https://bappeda.pangandarankab.go.id/public/p_rolfil/tupoksi

Cahya, (2020). Skripsi Proses Collaborative Governance Dalam Penerapan Uang Elektronik (Unik) Di Jalan Tol Kota Makassar. Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

Arifin dan Dewi, SIP., MPP. COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM Program Rintisan Desa Inklusif Di Desa Sendanga Di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNY

Ansell dan Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal

Saputra, Deden. 2020. Tatakelola Kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan

Doubleday. RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Pangandaran. 2021. Rencana Strategis (*miring*), Tempat, Penerbit

(RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021. 2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026

Internet :